

LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2021



KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviutas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Kinerja Kecamatan Pakong diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pakong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung

kinerja Kecamatan Pakong secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 16 Januari 2021

KECAMATAN PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

NIP. 19680103 199503 1 003

Penata Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1-2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2-4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4-5
D. Landasan Hukum	5-6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7-11
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	13-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21-32
B. Realisasi Anggaran	33-34
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34-37
BAB IV PENUTUP	38-39
LAMPIRAN	40
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH.....	40-41
MATRIKS RENSTRA.....	42-47
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	48-50
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....	51-52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pakong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Pakong mempunyai fungsi:

- 1) Pengeoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- 3) Pengeoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- 5) Pengeoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- 6) Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 7) Pengeoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 8) Pengeoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 9) Mengoordinasikan Kegiatan Pembinaan Urusan Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan kerukunan umat beragama tingkat kecamatan; dan
- 10) Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- 11) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;

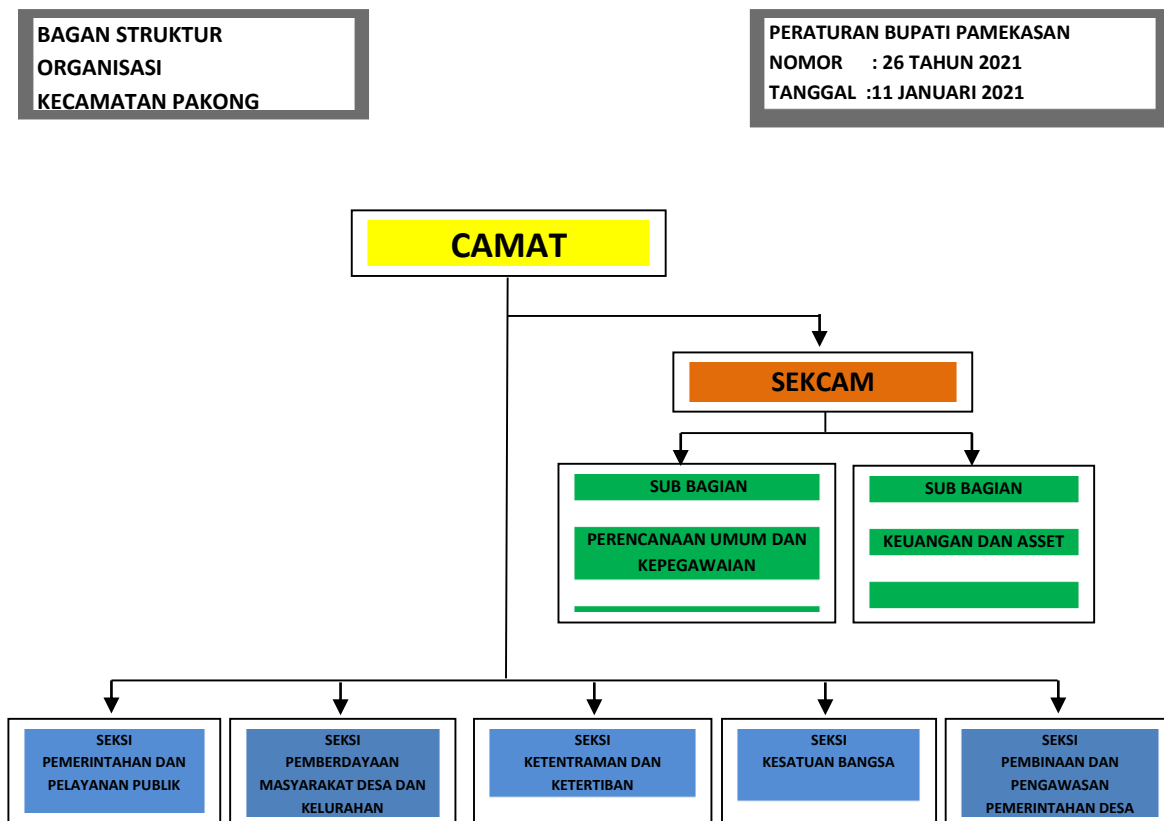
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Kasubag, yaitu:

- 3) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
- 4) Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 8) Seksi Kesatuan Bangsa;
- 9) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah

karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan dan Desa
2. Tata kelola Pemerintahan Desa
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Koordinasi Bidang Kesejahteraan sosial di wilayah kerja Kecamatan
5. Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Kecamatan Pakong periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan dan Desa
2. Tata kelola Pemerintahan Desa
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Koordinasi Bidang Kesejahteraan sosial di wilayah kerja Kecamatan
5. Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pakong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah
reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan
Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan
Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pakong mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Pakong KabupatenPamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATO R KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien			Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	80 (A)	83 (A)	85 (A)	87 (AA)	90 (AA)
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	80	85	90	95	100
SETELAH PERUBAHAN									
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan			Indek Pelayanan Publik	3,51	3,72	3,80	4,00	4,02
		1.1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP			85 (A)	87 (A)	90 (AA)
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	90	95	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dilayani		85%	90%	100%
		1.4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan Yang telah diberdayakan		85%	95%	100%
				Presentase Desa/Kelurahan yang telah dibina		100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Pakong periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN																																
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																														
1.	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	1.1.	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Range Nilai <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	Kementrian PAN dan RB
Range Nilai	Kategori	Makna																																			
0 – 1,00	F	Gagal																																			
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																																			
1,51 – 2,00	D	Buruk																																			
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																			
2,51 – 3,00	C	Cukup																																			
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																			
3,51 – 4,00	B	Baik																																			
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																																			
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																																			
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	Inspektorat Kabupaten Pamekasan																														
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik);	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat																														

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	4.88,31 – 100,00 A (Sangat baik).	
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat kecamatan	4.1	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	Persentase		$- \frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan}} \times 100\%$	
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	5.1	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah diberdayakan	Persentase		$- \frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan}} \times 100\%$	
		5.2	Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	Persentase		$- \frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Seluruh Kegiatan}} \times 100\%$	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Tahun 2021

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.01
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	85 (A)
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai	90
SETELAH PERUBAHAN						

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan			Indek Pelayanan public di Wilayah Kecamatan	Nilai	3.80
		1.1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	85(A)
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
		1.3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dilayani	Persentase	85%
		1.4	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	Persentase	85%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	Persentase	100%

Sumber :Rencana Kerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efesien	1.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.01
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	2.	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	85 (A)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai	90
Setelah Perubahan					
1.	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberika Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	1.	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Nilai	3.80
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	85(A)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
4.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	4.	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Yang dilayani	Persentase	85%
5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	5a.	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	Persentase	85%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		5b.	Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	Persentase	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pakong :

Tabel 2.5**Program dan Kegiatan Kecamatan Pakong Tahun 2021**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Pakong			1,440,365,174
7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Sarana prasarana yang terpebuhi		1,362,095,174
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen 4 Evaluasi	6.096.500
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	5.370.000
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	31 Dokumen RKA	726.500
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja OPD	1.209.003.174
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	1.201.503.174
7.1.1.2.02.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	7.500.000
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	14 ASN	21.826.000
7.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	14 Pegawai	21.826.000
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	11.000.000
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	15 Buah	6.000.000
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	5.000.000
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Kali Rapat Koordinasi	0

7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	59 Unit	0
7.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Kendaraan Dinas	0
7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Kendaraan Dinas	0
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Buah	0
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Unit	0
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</i>	18 Jasa	74.500.000
7.1.1.2.08.2	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 kali	8.500.000
7.1.1.2.08.4	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Jasa Layanan	66.000.000
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	11 Barang	39.669.500
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Jasa Pemeliharaan	25.000.000
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	0
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 gedung kantor	10.669.700
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	3.999.800
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</i>	90%	4.500.000
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perenagkat daerah dan instansi vertikal terkait</i>	85%	4.500.000
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	12 Kali	4.500.000
7.1.2.2.01.2	peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	12 Kali	0
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<i>persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit</i>	80%	0

		<i>Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan</i>		
7.1.2.2.02.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan</i>	2 Kali	0
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	44 Kali	0
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang dterfasilitasi</i>	90%	0
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 Desa	0
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	90%	12.000.000
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa</i>	100%	12.000.000
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	85 Orang	0
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	13 Kali	12.000.000
7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	12 Kali	0
7.1.4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti</i>	85%	50.000.000
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	95%	50.000.000
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertiksl di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	1 Kali	0
7.1.4.2.03.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	6 Kegiatan	50.000.000
7.1.5.2.01	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik</i>	80%	0
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</i>	80%	0
7.1.5.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	6 Pengaduan	0

7.1.5.2.01.6	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	4 Kali	0
7.1.5.2.01.7	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Kali	0
7.1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mneyenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	85%	11.770.000
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa</i>	100%	11.770.000
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	13 kali	2.670.000
7.1.6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	12 kali	0
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	4 Desa yang difasilitasi	9.100.000
7.1.6.2.01.7	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	12 Desa	0
7.1.6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	4 Dok	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2020 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dikarenakan Terjadi pergantian atau mutasi pejabat (point 1) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan Tahun 2021**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	1.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.01
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	2.	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	85 (A)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai	90
Setelah Perubahan					
1.	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	1.	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Nilai	3.80
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	85(A)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
4.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	4.	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Yang dilayani	Persentase	85%
5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan	5a.	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase	85%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
	Pembinaan Desa/Kelurahan	5b.	yang telah diberdayakan	Persentase	100%
			Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina		

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pakong Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Pakong			1.530.365.174
7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Sarana prasarana yang terpebuhi		1.357.095.174
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen 4 Evaluasi	6.096.500
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	5.370.000
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	31 Dokumen RKA	726.500
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja OPD	1.204.003.174
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	1.185.403.174
7.1.1.2.02.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	18.600.000
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	14 ASN	21.826.000

7.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	14 Pegawai	21.826.000
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	80 sarana	11.000.000
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	15 Buah	6.000.000
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1000 barang	5.000.000
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Kali Rapat Koordinasi	0
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	59 Unit	0
7.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Kendaraan Dinas	0
7.1.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Kendaraan Dinas	0
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Buah	0
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Unit	0
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</i>	18 Jasa	74.500.000
7.1.1.2.08.2	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 kali	8.500.000
7.1.1.2.08.4	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 Jasa Layanan	66.000.000
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	11 Barang	39.669.500
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Jasa Pemeliharaan	25.000.000
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	0
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 gedung kantor	10.669.700
7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	3.999.800
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	90%	4.500.000
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perenangkat daerah dan instansi vertikal terkait</i>	85%	4.500.000
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	12 Kali	4.500.000

	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan		
7.1.2.2.01.2	peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	12 Kali	0
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<i>persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan</i>	80%	0
7.1.2.2.02.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah Kecamatan</i>	2 Kali	0
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	44 Kali	0
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang dterfasilitasi</i>	90%	0
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 Desa	0
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	90%	12.000.000
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa</i>	100%	12.000.000
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	85 Orang	0
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	13 Kali	12.000.000
7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	12 Kali	0
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	85%	145.000.000
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	95%	145.000.000
7.1.4.2.03.1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	1 Kali	0
7.1.4.2.03.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	6 Kegiatan	145.000.000
7.1.5.2.01	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik	80%	0
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</i>	80%	0

7.1.5.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	6 Pengaduan	0
7.1.5.2.01.6	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	4 Kali	0
7.1.5.2.01.7	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Kali	0
7.1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	85%	11.770.000
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa</i>	100%	11.770.000
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	13 kali	2.670.000
7.1.6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	12 kali	0
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	4 Desa yang difasilitasi	9.100.000
7.1.6.2.01.7	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	12 Desa	0
7.1.6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	4 Dok	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakong Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pakong Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	4,01	Na	-	-	Kertas kerja monitoring dan evaluasi kinerja
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	85 (A)	76.58 (BB)	90	Cukup	Dokumen SAKIP
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	90	89,06	98	Cukup	Kertas kerja monitoring dan evaluasi kinerja
Setelah perubahan							
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	3,80	Na	-	-	Kertas kerja monitoring dan evaluasi kinerja
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	85 (A)	76,58 (BB)	90	Cukup	Dokumen SAKIP
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	89,06	98	Cukup	SKM, Kertas kerja monitoring dan evaluasi kinerja

4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Yang dilayani	85%	61%	71,76	Kurang	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	85%	51%	60	Kurang	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	100%	74%	74	Kurang	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan

Uraian penjelasan tabel :

1. Indeks pelayanan publik pada tahun 2021 di targetkan sebesar 3,80 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.
2. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 76,58 dan capaian kinerja sebesar 90 % atau kategori Cukup. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

3. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 5 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 89 dengan angka Indeks sebesar 98 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah kecamatan.
4. Berdasarkan pengukuran terhadap tujuan meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan, dari hasil kegiatan yang dilaksanakan mencapai 61% dengan capaian 71,76 % berdasarkan target dan mendapat nilai kategori kurang. Kendala dalam masalah tersebut karena adanya pandemi Covid-19 sehingga capaian tersebut perlu ditingkatkan.
5. Berdasarkan pengukuran terhadap tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa/kelurahan, untuk indikator masyarakat desa/kelurahan yang telah diberdayakan persentase kegiatan yang dilaksanakan mencapai 51% dengan capaian 60 % berdasarkan target dan mendapat nilai kategori kurang. Untuk indikator selanjutnya yaitu desa/kelurahan yang telah dibina persentase kegiatan yang telah dilakukan mencapai 74% dengan capaian 74 dan mendapat nilai kategori kurang. Kendala dalam masalah tersebut karena adanya pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efesien	Indeks Pelayanan Publik	3,76	-	-	4,01		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	83 (A)	76,38 (BB)	92	85 (A)	76,58 (BB)	90
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	85	82	96	90	89,06	98
SETELAH PERUBAHAN								
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberika Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	3,76	-	-	3,80	-	-
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	83 (A)	76,38 (BB)	92	85 (A)	76,58 (BB)	90
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	82	96	90	89,06	98
4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	-			85%	61%	71,76

		Kecamatan Yang dilayani						
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	-			85%	51%	60
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	-			100%	74%	74

Uraian penjelasan tabel :

Hasil Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 83 (A), dengan realisasi kinerja 76,38 (BB) dan capaian kinerja sebesar 92% atau kategori Cukup. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 85 (A), dengan realisasi kinerja 76,58 (BB) dan capaian kinerja sebesar 90% atau kategori Cukup. Ada kenaikan capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip sebesar 0,20 % dari tahun 2020 sebesar 92 % menjadi 90 % pada tahun 2021 turun dikarenakan target nilai sakip meningkat.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 ditargetkan 85 dengan realisasi sebesar 82 dan capaian kinerja sebesar 96% atau katagori cukup. Sementara pada tahun 2021 ditargetkan 90 dengan realisasi sebesar 89,06 dan capaian kinerja sebesar 98% atau kategori Sangat baik.

Sementara untuk capaian presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang dilayani pada tahun 2021 realisasi kegiatan mencapai 61% dengan capaian 71,76 terhadap target 85%. Pada tahun 2020 tidak ada hasil, dikarenakan tidak ada tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan.

Terakhir untuk capaian Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan pada tahun 2021 realisasi kegiatan mencapai 51% dengan

capaian 60 terhadap target 85%. Sedangkan untuk capaian Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina pada tahun 2021 realisasi kegiatan mencapai 74% dengan capaian 74 terhadap target 74%. Pada tahun 2020 tidak ada hasil, dikarenakan tujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan merupakan tujuan baru.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efesien	Indeks Pelayanan Publik	-	4,51	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	76,58 (BB)	90 (AA)	85.09
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89,06	100	89,06
Setelah Perubahan					
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberika	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	-	4,02	-

	Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan				
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	76,58 (BB)	90 (AA)	85.09
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,06	100	89,06
4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Yang dilayani	61%	100%	61
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	51%	100%	51
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	74%	100%	74

Uraian penjelasan tabel :

1. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) target pada tahun 2021 adalah NA sehingga tingkat kemajuan juga NA.
2. Sedangkan untuk Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah dengan indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Sakip tingkat kemajuan sebesar 85,09%.

3. Tingkat kemajuan Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,06 %.
4. Untuk Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan hasil capaian 61%, sehingga kedepannya harus lebih meningkatkan kinerja sehingga hasil yang dicapai semakin baik.
5. Dan yang terakhir untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan. Untuk Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan mencapai 51. dan Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina mencapai 74.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Na	3,25	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	76,58 (BB)	75	101.84
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	82	81	101.23

		pelayanan kecamatan			
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberika Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indek Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Na	3,25	Na
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	76,58 (BB)	75	102.1
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,06	81	109.95
4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Yang dilayani	61%	-	
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	51%	-	
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	74%	-	

1. Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar N/A sedangkan standar nasional dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah 3,25 capaian kinerja sebesar N/A. di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan

publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punishment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

2. Pada indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi Sakip realisasi pada tahun 2021 sebesar 76,58 (BB), sedangkan standar Nasional sebesar 75 sehingga perbandingan capaian dengan standar nasional sebesar 102.1 %.
3. Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 89.06 sedangkan standar nasional Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 81 sehingga perbandingan capaian dengan standar nasional sebesar 109.95 %. dengan angka Indeks sebesar 89.06 maka kinerja unit kepuasan masyarakat ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81.26 – 100.0 Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks.
4. Untuk sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan tidak ada nilai standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
-----	----------------	-------------------	--------	-----------	-----------	----------------------------------	-----------------------

1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	4,01	Na	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	85 (A)	76,58 (BB)	90	Gagal karena adanya Dokumen SAKIP yang belum selaras	Meningkatkan/terus melengkapi Dokumen Sakip berdasarkan di LHE
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	90	89,06	98	Berhasil karena adanya Kinerja aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan
Setelah Perubahan							
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	3,80	Na	-		
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	85 (A)	76,58 (BB)	90	Gagal karena adanya Dokumen SAKIP yang belum selaras	Meningkatkan/terus melengkapi Dokumen Sakip berdasarkan di LHE
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	89,06	98	Berhasil karena adanya Kinerja aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat	Meningkatkan kualitas Pelayanan
4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	85%	61%	71,76	Gagal karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya	Tetap Mengadakan Kegiatan Namun dengan Proses yang Ketat

		Yang dilayani				pandemic Covid-19	
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	85%	51%	60	Gagal karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19	Tetap Mengadakan Kegiatan Namun dengan Proses yang Ketat
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	100%	74%	74	Gagal karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19	Tetap Mengadakan Kegiatan Namun dengan Proses yang Ketat

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran. Pada Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat BB (Memuaskan) dengan nilai sebesar 76,58. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 5 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89,06 dengan angka Indeks sebesar 98 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks.

Berdasarkan pengukuran terhadap tujuan meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan, dari hasil kegiatan

yang dilaksanakan mencapai 61% dengan capaian 71,76 % berdasarkan target dan mendapat nilai kategori kurang. Kendala dalam masalah tersebut karena adanya pandemi Covid-19 sehingga capaian tersebut perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengukuran terhadap tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa/kelurahan, untuk indikator masyarakat desa/kelurahan yang telah diberdayakan persentase kegiatan yang dilaksanakan mencapai 51% dengan capaian 60 % berdasarkan target dan mendapat nilai kategori kurang. Untuk indikator selanjutnya yaitu desa/kelurahan yang telah dibina persentase kegiatan yang telah dilakukan mencapai 74% dengan capaian 74 dan mendapat nilai kategori kurang. Kendala dalam masalah tersebut karena adanya pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	IndikatorK inerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	IndikatorKin erja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efesien	Indeks Pelayanan Publik	76				
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi • Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik • Persentase peningkatan kompetensi aparatur • Persentase perencanaan dan evaluasi	78	Menunjang

					kinerja yang berkualitas		
3				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	78	Menunjang
4				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	81	Menunjang
5				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	50	Tidak Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-	
6				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	72	Menunjang
7				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	72	Menunjang
8				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73	Menunjang
9				Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi	100	Menunjang

				Perangkat Daerah			
10				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	100	Menunjang
11				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	93	Menunjang
12				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	100	Menunjang
13				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	85	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	-	
14				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
15				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	
16				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	

					yang disediakan		
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</i>	99	Menunjang
17				Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	91	Menunjang
18				Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	Menunjang
19				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	100	Menunjang
20				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100	Menunjang
21				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-	
22				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	100	Menunjang

				Bangunan Lainnya	Lainnya yang direhabilitasi		
23				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	Menunjang
24	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</i>	100	Menunjang
25				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perenagkat daerah dan instansi vertikal terkait</i>	100	Menunjang
26				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	100	Menunjang
27				peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan yang efektif	-	
28				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	<i>persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</i>	-	

				Daerah yang ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan		
29				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah Kecamatan</i>	-	
30				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	-	
31				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang diterfasilitasi</i>	-	
32				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	-	
33	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	61	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti</i>	61	Menunjang
34				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	61	Menunjang

					yang terfasilitasi		
35				Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	-	
36				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	61	Menunjang
37				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik	-	
38				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</i>	-	
39				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	-	
40				Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan	-	
41				Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi)	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaan	-	

				wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	dan ketahanan nasional		
42	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	51	Menunjang
43				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa</i>	51	Menunjang
44				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	-	
45				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	51	Menunjang
46				Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	-	
47		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	74	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mneyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik</i>	74	Menunjang
48				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	<i>persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai</i>	74	Menunjang

				Pemerintahan Desa	<i>penyelenggaraan pemerintahan Desa</i>		
49				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	100	Menunjang
50				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	-	
51				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	66	Menunjang
52				Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	-	
53				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	-	

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas menunjukkan 6 Program mengalami 5 keberhasilan dan 1 kegagalan karena tidak ada anggaran, dari 6 program tersebut terdiri dari 14 kegiatan dengan rincian 4 kegiatan tanpa anggaran dan 10 kegiatan dengan anggaran. Dari semua program mengalami keberhasilan

meskipun tidak maksimal itupun terjadi karena ada faktor – faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut:

- A. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta penggalian dan pengolaan sumber potensi Desa/Kelurahan Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;
- B. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Pakong sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- C. Adanya program koordinasi yang dilakukan antar OPD dilingkup Kecamatan Pakong sehingga dapat mewujudkan salah satu tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan meskipun perlu ditingkatkan untuk tahun selanjutnya.
- D. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di SKPD Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

Sedangkan untuk solusi terkait program atau kegiatan yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa kegiatan tersebut akan di tingkatkan pada tahun selanjutnya.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,357,095,174.00	1,293,487,081.00	95.31
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,096,500.00	4,990,000.00	81.85
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,370,000.00	4,570,000.00	85.10
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	726,500.00	420,000.00	57.81
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	100
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,204,003,174.00	1,142,541,417.00	94.90
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,185,403,174.00	1,129,041,417.00	95.25
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18,600,000.00	13,500,000.00	72.58
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,826,000.00	21,794,000.00	99.85
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21,826,000.00	21,794,000.00	99.85
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,000,000.00	10,418,000.00	94.71
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	4,418,000.00	88.36
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	100

15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	100
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	100
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	100
18	Pengadaan Mebel	0	0	100
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	100
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,500,000.00	74,074,964.00	99.43
21	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	8,500,000.00	8,074,964.00	95.00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	66,000,000.00	66,000,000.00	100.00
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39,669,500.00	39,668,700.00	100.00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	100
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,669,700.00	10,669,700.00	100.00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,999,800.00	3,999,000.00	99.98
28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
29	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
30	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00

31	peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	0	0	100
32	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	100
33	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	100
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	100
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	100
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	100
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	100
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88
41	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	0	0	100
42	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83
43	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83
44	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	0	0	100
45	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83

46	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	100
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	100
48	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	100
49	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	0	0	100
50	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	0	0	100
51	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,770,000.00	8,695,000.00	73.87
52	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,770,000.00	8,695,000.00	73.87
53	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,670,000.00	2,670,000.00	100.00
54	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	100
55	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9,100,000.00	6,025,000.00	66.21
56	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	0	0	100
57	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	100

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	3,80	-	-	1.530.365.174	1.401.9057.081	91,61	-
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 (A)	76,58 (BB)	90	1.357.095.174	1.293.487.081	95,31	5.31
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	90	89,06	98	4.500.000	4.500.000	100	2
4	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	85%	61%	71,76	145.000.000	88.210.00	60,83	10.93
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	85%	51%	60	12.000.000	4.500.000	58,88	7.88
		100%	74%	74	11.770.000	8.695.000	73,87	0.13

Uraian penjelasan tabel :

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan analisis efisien dan efektifitas anggaran adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	IndikatorKinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85%	85%	100%	1,357,095,174.00	1,293,487,081.00	95.31	4.69
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%	6,096,500.00	4,990,000.00	81.85	18.15
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	5,370,000.00	4,570,000.00	85.10	14.9
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31	31	100%	726,500.00	420,000.00	57.81	42.19
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-	0	0	0	0
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100%	1,204,003,174.00	1,142,541,417.00	94.90	5.1
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100%	1,185,403,174.00	1,129,041,417.00	95.25	4.75

8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	18,600,000.00	13,500,000.00	72.58	27.42
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14	7	50%	21,826,000.00	21,794,000.00	99.85	-49.85
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14	7	50%	21,826,000.00	21,794,000.00	99.85	-49.85
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	80	100%	11,000,000.00	10,418,000.00	94.71	5.29
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	15	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000	1,796	180%	5,000,000.00	4,418,000.00	88.36	91.64
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	-	0%	0	0	0	0
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%	0	0	0	0
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0%	0	0	0	0
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0%	0	0	0	0
18	Pengadaan Mebel	0	0	0%	0	0	0	0
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0%	0	0	0	0
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	18	18	100%	74,500,000.00	74,074,964.00	99.43	0.57

	Pemerintahan Daerah							
21	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12	12	100%	8,500,000.00	8,074,964.00	95.00	5
22	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6	6	100%	66,000,000.00	66,000,000.00	100.00	0
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11	3	27%	39,669,500.00	39,668,700.00	100.00	-73
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	100%	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	-	0%	0	0	0	0
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%	10,669,700.00	10,669,700.00	100.00	0
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100%	3,999,800.00	3,999,000.00	99.98	0.02
28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90%	90%	100%	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0
29	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	85%	85%	100%	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0

	Tingkat Kecamatan							
30	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	1	8%	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	-92
31	peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12	0	0%	0	0	0	0
32	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80%	0	0%	0	0	0	0
33	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	0	0%	0	0	0	0
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	0	0%	0	0	0	0
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90%	0	0%	0	0	0	0
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan	12	0	0%	0	0	0	0

	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90%	90%	100%	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88	41.12
38	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88	41.12
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	85	-	0%	0	0	0	0
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	12	92%	12,000,000.00	7,065,000.00	58.88	33.12
41	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	12	0	0%	0	0	0	0
42	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	100%	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83	39.17
43	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95%	-	61%	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83	0.17
44	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	0	-	0%	0	0	0	0

	Vertiksl di wilayah Kecamatan							
45	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	1	17%	145,000,000.00	88,210,000.00	60.83	-43.83
46	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80%	-	0%	0	0	0	0
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80%	-	0%	0	0	0	0
48	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentua Peraturan Perundang-Undangan	6	-	0%	0	0	0	0
49	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	4	-	0%	0	0	0	0
50	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1	-	0%	0	0	0	0
51	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.00 %	85%	100%	11,770,000.00	8,695,000.00	73.87	26.13
52	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	100.00 %	100%	11,770,000.00	8,695,000.00	73.87	26.13

	Pemerintahan Desa							
53	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	13	100%	2,670,000.00	2,670,000.00	100.00	0
54	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	-	0%	0	0	0	0
55	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	4	100%	9,100,000.00	6,025,000.00	66.21	33.79
56	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	12	-	0%	0	0	0	0
57	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	-	0%	0	0	0	0

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pakong anggaran tahun 2021 dalam menjalankan aktifitasnya tingkat efisiensi sebanyak 6 program dengan rincian 1 program tidak ada anggaran dan 5 ada anggaran, dengan 14 kegiatan dengan rincian 4 kegiatan tanpa anggaran dan 10 kegiatan dengan anggaran, dan memiliki total efisiensi 5,06 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 91% (kategori Na)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 90% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 71% (kategori Cukup)
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 67% (kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja namun ada beberapa yang harus ditingkatkan di tahun depan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.530.365.174,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.401.957.081,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 91,61% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 25%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 15 Februari 2021

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN,



Drs. EKA JUDYASETIAWAN

NIP. 19680103 1995013 1 003

Pembina Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAKONG

Jalan Raya Pakong No. 75 Pamekasan

TELP. (0324) 7710211

KEPUTUSAN CAMAT PAKONG

Nomor :188/3/432.509/2021

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PAKONG**

- Menimbang** : a. dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Pakong maka perlu dilakukan rencana aksi dan pemenuhan terhadap dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Camat Pakong
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - b. Menyusun dan/atau mereview Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - d. Menyusun Perjanjian Kinerja;
 - e. Menyusun Pengukuran Kinerja;
 - f. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakong

Pada tanggal : 12 Januari 2021



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19680103 199503 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PAKONG
 NOMOR : 188/3/432.509/ 2021
 TENTANG : TIM IMPLEMENTASI SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH
 (SAKIP) KECAMATAN PAKONG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PAKONG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Pakong
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	1. Kasubbag Keuangan dan Aset 2. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 5. Kasi Kesatuan Bangsa 6. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7. Unsur Staf Subbag Perencanaan

CAMAT PAKONG

Drs. EKA JUDYA SETIAWAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680103 199503 1 003

MATRIX RENSTRA KECAMATAN PAKONG TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						targ et	Rp.	Targ et	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.	targe t	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Sebelum Perubahan																							
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	3	8	13				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	95%	80%	360,500,000	83%	392,000,000	85%	360,000,000	87%	360,000,000	90%	365,000,000	90%	365,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
								Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A (80)	360,500,000	A (83)	392,000,000	A (85)	360,000,000	AA (87)	360,000,000	AA (90)	365,000,000	AA (90)	365,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	13	01			• Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	90%	90%	72,000,000	90%	72,000,000	90%	78,000,000	90%	78,000,000	90%	78,000,000	100%	78,000,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong

		3	8	13	01	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat ke luar daerah	90%	10 Oran g/12 Bulan	10,00 0,000	10 Oran g/12 Bulan	10,00 0,000	10 Oran g/12 Bulan	10,00 0,000	10 Oran g/12 Bulan	10,00 0,000	10 Oran g/12 Bulan	10,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng		
		3	8	13	01	02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang di Akomodir	95%	6 Item	62,00 0,000	6 Item	62,00 0,000	6 Item	68,00 0,000	6 Item	68,00 0,000	6 Item	68,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng		
		3	8	13	02		Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Prosentas e Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	95%														
								• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya														95%	233,5 00,00 0
		3	8	13	02	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Dalam Kondisi Baik	95%	1 Unit	15,00 0,000	1 Unit	15,00 0,000	1 Unit	15,00 0,000	1 Unit	15,00 0,000	1 Unit	15,00 0,000	1 Unit	15,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng

		3	8	1	0	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	95%	6 Item /2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,00 0,000	6 Item /2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,00 0,000	6 Item/ 2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,00 0,000	6 Item/ 2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,00 0,000	6 Item/ 2 Roda 4 dan 4 Roda 2	20,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong		
		3	8	1	0	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	95%	5 Jenis	5,000 ,000	5 Jenis	10,00 0,000	5 Jenis	15,00 0,000	5 Jenis	15,00 0,000	5 Jenis	20,00 0,000	5 Jenis	20,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Yang Diadakan	95%	8 Unit	28,50 0,000	8 Unit	35,00 0,000	8 Unit	30,00 0,000	8 Unit	30,00 0,000	8 Unit	30,00 0,000	8 Unit	30,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1	0	0	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler Yang Diadakan	95%	100 Buah	40,00 0,000	50 Buah	20,00 0,000	50 Buah	20,00 0,000	50 Buah	20,00 0,000	50 Buah	20,00 0,000	50 Buah	20,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan	95%	1 Unit	20,00 0,000	3 Unit	60,00 0,000	1 Unit	20,00 0,000	1 Unit	20,00 0,000	1 Unit	20,00 0,000	1 Unit	20,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1	0	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas dalam kondisi baik	95%	1 Unit	5,000 ,000	1 Unit	5,000 ,000	1 Unit	7,000, 000	1 Unit	7,000, 000	1 Unit	7,000, 000	1 Unit	7,000, 000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong

		3	8	1 3	0 2	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat rumah Dinas Gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas Gedung Kantor yang direhabilitasi	95%	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,00 0,000	1 Unit	50,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1 3	0 2	1 7	Pavingisasi Halaman Kantor	Jumlah Paving yang diadakan	0%	7x5 m	75.00 0.000	0	75.00 0.000	7x5 m	0	0	0	0	0	7x5 m	75.00 0.000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1 3	0 2	2 2	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	95%	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	14 Oran g/12 Bulan	50,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1 3	0 3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	95%	95%	55,00 0,000	95%	55,00 0,000	95%	55,00 0,000	95%	55,00 0,000	95%	55,00 0,000	95%	55,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong
		3	8	1 3	0 3	0 1	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kegiatan Kinerja Yang Dihasilkan	95%	6 Dokumen	30,00 0,000	6 Dokumen	30,00 0,000	6 Dokumen	30,00 0,000	6 Dokumen	30,00 0,000	6 Dokumen	30,00 0,000	6 Dokumen	30,00 0,000	Kantor Kecamatan Pakong	Kantor Kecamatan Pakong

		3	8	1 3	0 3	0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Yang Disusun Dengan Kualitas Baik	95%	6 Dok ume n	25,00 0,000	6 Dok ume n	25,00 0,000		25,00 0,000	6 Doku men	25,00 0,000	6 Doku men	25,00 0,000	6 Doku men	25,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	Menin gkatny a Kualita s Pelaya nan Kecam atan							Indeks kepuasan pelayanan kecamata n Pakong	95%	80%	367,0 00,00 0	85%	357,0 00,00 0	90%	347,0 00,00 0	95%	347,0 00,00 0	100%	367,0 00,00 0	100%	367,0 00,00 0	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
		3	8	1 3	0 8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelu rahan yang melaksana kan tata kelola pemerinta han dengan kualitas baik	95%	95%	292,0 00,00 0	95%	282,0 00,00 0	95%	272,0 00,00 0	95%	272,0 00,00 0	95%	292,0 00,00 0	100%	292,0 00,00 0	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng	
							Persentase lembaga kemasyara katan yang aktif	95%															
							persentase sengketa masyaraka t yang tertangani	95%															
		3	8	1 3	0 8	0 1	Pembinaan Penyelenggaraa n Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Musrenba ng Yang Terlaksana	95%	13 Kali	20,00 0,000	13 Kali	20,00 0,000	13 Kali	20,00 0,000	13 Kali	20,00 0,000	13 Kali	20,00 0,000	13 Kali	20,00 0,000	Kanto r Keca mata n	Kant or Keca mata n

																				Pako ng	Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 2	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	95%	24 Kali	30,00 0,000	24 Kali	30,00 0,000	24 Kali	30,00 0,000	24 Kali	30,00 0,000	24 Kali	30,00 0,000	30,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 3	Fasilitas pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Organisasi Perempua n Dan PKK yang difasilitasi	95%	38 Kali	18,00 0,000	38 Kali	18,00 0,000	38 Kali	18,00 0,000	38 Kali	18,00 0,000	38 Kali	18,00 0,000	18,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Pelatihan Peningkata n dan Profesional isme	95%	12 Kali	15,00 0,000	12 Kali	15,00 0,000	12 Kali	15,00 0,000	12 Kali	15,00 0,000	12 Kali	15,00 0,000	15,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 5	Fasilitasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kegiatan Kepemuda an dan Olahraga yang terfasilitasi	95%	2 Kali	15,00 0,000	2 Kali	15,00 0,000	2 Kali	15,00 0,000	2 Kali	15,00 0,000	2 Kali	15,00 0,000	15,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 8	Koordinasi dan Operasional Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah Hari Besar Keagamaa n Dan Hari Besar Nasional Yang Dikoordina sikan	95%	2 Item	30,00 0,000	2 Item	40,00 0,000	2 Item	30,00 0,000	2 Item	30,00 0,000	2 Item	30,00 0,000	30,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	1 0	Monitoring pengendalian keamanan dan	Jumlah Pemilu Yang	95%	2 Item	10,00 0,000	2 Item	-	2 Item	-	2 Item	-	2 Item	10,00 0,000	10,00 0,000	Kanto r Keca	Kant or Keca

						ketertiban pelaksanaan pemilu	Dimonitoring														mata n Pako ng	mata n Pako ng
	3	8	13	08		Pelaksanaan Istighasah/Pengajian Kepala Daerah Bersama Masyarakat	Jumlah Istighasah/Pengajian yang Terlaksana	95%	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	2 Kali	49,000,000	Kantor Kecamatan Pako ng	Kantor Kecamatan Pako ng
	3	8	13	08	47	Optimalisasi Pemungutan PBB	Jumlah Desa Yang Terfasialitasi	95%	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	12 Desa	15,000,000	Kantor Kecamatan Pako ng	Kantor Kecamatan Pako ng
	3	8	13	08	46	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu Yang dibina	95%	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	3 Kali	20,000,000	Kantor Kecamatan Pako ng	Kantor Kecamatan Pako ng
	3	8	13	08	50	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pilkades Yang Dimonotoring	95%	8 Kali	10,000,000	8 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	8 Kali	10,000,000	8 Kali	10,000,000	Kantor Kecamatan Pako ng	Kantor Kecamatan Pako ng
	3	8	13	08	51	Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi/Konsolidasi/Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat	Jumlah Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Bersama Ulama dan Masyarakat yang dilaksanakan	95%	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	2 Kali	40,000,000	Kantor Kecamatan Pako ng	Kantor Kecamatan Pako ng
	3	8	13	08	60	Penanganan Sengketa Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang	95%	6 peng	10,000,000	6 peng	10,000,000	6 peng	10,000,000	6 peng	10,000,000	6 peng	10,000,000	6 peng	10,000,000	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan

							diselesaika n dengan baik		adua n		adua n		adua n		adua n		adua n		adua n		mata n Pako ng	mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	6 1	Fasilitasi Penanganan Kelancaran Arus Lalu Lintas Pasar	Jumlah Pasar Yang Terfasilitas i	95%	2 Loka si	10,00 0,000	2 Loka si	10,00 0,000	2 Lokas i	10,00 0,000	2 Lokas i	10,00 0,000	2 Lokas i	10,00 0,000	2 Lokas i	10,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 9		Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	• Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	95%	95%	75,00 0,000	95%	75,00 0,000	95%	75,00 0,000	95%	75,00 0,000	95%	75,00 0,000	100%	75,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 1	Pengembangan dan Operasionalisasi Aplikasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan Terpadu Yang Dikemban gkan	90%	2 Aplik asi	50,00 0,000	2 Aplik asi	50,00 0,000	2 Aplik asi	50,00 0,000	2 Aplik asi	50,00 0,000	2 Aplik asi	50,00 0,000	2 Aplik asi	50,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
	3	8	1 3	0 8	0 2	Survey kepuasan masyarakat	Jumlah Survey Yang Dilaksanak an	95%	2 Kali	25,00 0,000	2 Kali	25,00 0,000	2 Kali	25,00 0,000	2 Kali	25,00 0,000	2 Kali	25,00 0,000	2 Kali	25,00 0,000	Kanto r Keca mata n Pako ng	Kant or Keca mata n Pako ng
Setelah Perubahan																						
Tata Kelola Pemer intah an							Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	NA					3,80	1,440, 365,1 74	4,00	2,083, 137,3 52	4,02	2,161, 294,2 85	4,02	2,161, 294,2 85		
Efektif dan Akuntabel dalam Memb erika	Menin gkatny a Nilai AKIP Perang kat Daerah						Nilai Evaluasi SAKIP	NA					85 (A)	1,362, 095,1 74	87 (AA)	1,845, 634,1 02	90 (AA)	1,886, 294,2 85	90 (AA)	1,886, 294,2 85		

n Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan		7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	NA						85%	50,669,500	90%	141,354,050	100%	180,508,571	100%	180,508,571	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	NA						100%	1,283,503,174	100%	1,634,280,052	100%	1,660,785,714	100%	1,660,785,714	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase peningkatan kompetensi aparatur	NA						80%	21,826,000	90%	10,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
								Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	NA						85%	6,096,500	90%	60,000,000	95%	20,000,000	95%	20,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	NA						6 Dokumen Evaluasi	6,096,500	6 Dokumen Evaluasi	60,000,000	6 Dokumen Evaluasi	20,000,000	6 Dokumen Evaluasi	20,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	NA						2 Dokumen	5,370,000	3 dokumen	50,000,000	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	NA						31 Dokumen RKA	726,500	34 dokumen RKA	0	36 dokumen RKA	0	36 dokumen RKA	0	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	NA						0	0	4 Kali	10,000,000	4 Kali	10,000,000	4 Kali	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</i>	NA						1 Unit Kerja OPD	1,209,003,174	1 Unit Kerja OPD	1,559,780,252	1 Unit Kerja OPD	1,586,285,714	1 Unit Kerja OPD	1,586,285,714	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyalangan gaji dan tunjangan	NA						14 bulan	1,201,503,174	14 bulan	1,539,780,252	14 bulan	1,566,285,714	14 bulan	1,566,285,714	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.02	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA						12 Bulan	7,500,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi</i>	NA						14 ASN	21,826,000	14 ASN	10,000,000	14 ASN	25,000,000	14 ASN	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	NA						14 pegawai	21,826,000	16 pegawai	10,000,000	116 pegawai	25,000,000	16 pegawai	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	NA						80 sarana	11,000,000	85 sarana	21,629,750	90 sarana	21,000,000	90 sarana	21,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	NA						15 Buah	6,000,000	15 Buah	6,500,000	15 Buah	6,000,000	15 Buah	6,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	NA						1000 barang	5,000,000	1000 barang	5,129,750	1000 barang	5,000,000	1000 barang	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	NA						12 Kali Rapat Koordinasi	-	12 Kali Rapat Koordinasi	10,000,000	12 Kali Rapat Koordinasi	10,000,000	12 Kali Rapat Koordinasi	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA						59 Unit	0	59 Unit	30,358,300	59 Unit	60,000,000	59 Unit	60,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	NA						1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	1 Kendaraan Dinas	0	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA						2 Kendaraan Dinas	0	2 Kendaraan Dinas	0	2 Kendaraan Dinas	50,000,000	2 Kendaraan Dinas	50,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	NA						5 Buah	0	5 Buah	4,911,000	5 Buah	5,000,000	5 Buah	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	NA						3 Unit	0	4 Unit	25,447,300	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan an yang disediakan	NA						18 Jasa	74,500,000	18 Jasa	74,499,800	18 Jasa	74,500,000	18 Jasa	74,500,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08	2	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	NA						12 kali	8,500,000	12 kali	8,499,800	12 kali	8,500,000	12 kali	8,500,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.08	4	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	NA						6 Jasa Layanan	66,000,000	6 Jasa Layanan	66,000,000	6 Jasa Layanan	66,000,000	6 Jasa Layanan	66,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	NA					11 Barang	39,669,500	11 Barang	89,366,000	11 Barang	99,508,571	11 Barang	99,508,571	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	NA					2 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	2 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	25 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	25 Jasa Pemeliharaan	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	NA					5 Jenis	-	5 Jenis	5,014,000	5 Jenis	5,000,000	5 Jenis	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	NA					1 gedung kantor	10,669,700	1 gedung kantor	54,352,000	1 gedung kantor	64,508,571	1 gedung kantor	64,508,571	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	NA					1 Unit	3,999,800	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA					90	4,500,000	95	45,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

	nan Publik Kecamatan																						
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan						Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	NA					85%	50,000,000	90%	118,763,250	100%	110,000,000	100%	110,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong	
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan						Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	NA					85%	12,000,000	95%	38,740,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong	
							Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	NA					100%	11,770,000	100%	35,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong	
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	NA					90%	4,500,000	95%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Kegiatan Pemerintahan dyang sesuai dengan perenagkat daerah dan	NA					85%	4,500,000	95%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

[illegible]

		7	1	2	2.02	1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	NA					2 Kali	0	2 Kali	5,000,000	2 Kali	10,000,000	2 Kali	10,000,000	Kecamatan Pakong	
		7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan Efektifitasnya	NA					44 Kali	0	44 Kali	15,000,000	44 Kali	15,000,000	44 Kali	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang dterfasilitasi</i>	NA					90%	0	95%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	NA					12 Desa	0	12 Desa	10,000,000	12 Desa	10,000,000	12 Desa	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat</i>	NA					90%	12,000,000	95%	38,740,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>persentase Koordinasi dan kegiatan pemberdayaan Desa</i>	NA					100%	12,000,000	100%	38,740,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

		7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok masyarakat Desa dalam forum Musrembangdes	NA					85 Orang	0	100 Orang	10,000,000	120 Orang	10,000,000	120 Orang	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya	NA					13 Kali	12,000,000	13 Kali	13,740,000	13 Kali	15,000,000	13 Kali	15,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi pemberdayaan Masyarakat oleh pemerintah dan pihak swasta di kecamatan	NA					12 Kali	0	12 Kali	15,000,000	12 Kali	10,000,000	12 Kali	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan /Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	NA					85%	50,000,000	90%	93,763,250	100%	85,000,000	100%	85,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	NA					95%	50,000,000	100%	93,763,250	100%	85,000,000	100%	85,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

	7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas atau Koordinasi yang dilaksanakan	NA					1 Kali	0	1 Kali	5,000,000	1 Kali	5,000,000	1 Kali	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	4	2.03	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	NA					6 Kegiatan	50,000,000	6 Kegiatan	88,763,250	6 Kegiatan	80,000,000	6 Kegiatan	80,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik	NA					80%	0	90%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase masyarakat desa /kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</i>	NA					80%	0	85%	25,000,000	90%	25,000,000	90%	25,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	NA					6 Pengaduan	0	6 Pengaduan	5,000,000	6 Pengaduan	5,000,000	6 Pengaduan	5,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
	7	1	5	2.01	6	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tugas Forum Koordinasi Pimpinan	NA					4 Kali	0	4 Kali	10,000,000	4 Kali	10,000,000	4 Kali	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong

								yang dilaksana n															
		7	1	5	2. 0 1	7	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Ssosialisasi dan konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan wawasan Kebangsaa n dan ketahanan nasional	NA					1 Kali	0	1 Kali	10,000 ,000	1 Kali	10,000 ,000	1 Kali	10,000 ,000	Keca mata n Pako ng	Keca mata n Pako ng
		7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mneyeleng garakan Pemerintah an Desa Dengan Baik	NA					85%	11,770 ,000	90%	35,000 ,000	100%	80,000 ,000	100%	80,000 ,000	Keca mata n Pako ng	Keca mat an Pako ng
		7	1	6	2. 0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang mendapatka n fasilitasi mengenai penyelengg araan pemerintaha n Desa	NA					100%	11,770 ,000	100%	35,000 ,000	100%	80,000 ,000	100%	80,000 ,000	Keca mata n Pako ng	Keca mat an Pako ng
		7	1	6	2. 0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna naan Aset Desa yang tersusun dengan baik	NA					13 kali	2,670, 000	13 kali	15,000 ,000	13 kali	15,000 ,000	13 kali	15,000 ,000	Keca mata n Pako ng	Keca mata n Pako ng
		7	1	6	2. 0 1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaa n tugas kepala desa dan perangkat	NA					12 kali	0	12 kali	10,000 ,000	12 kali	10,000 ,000	12 kali	10,000 ,000	Keca mata n Pako ng	Keca mata n Pako ng

								desa yang dilaksanakan															
		7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	NA					4 Desa yang difasilitasi	9,100,000	0	0	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	35,000,000	8 Desa dan 2 pemilu yang difasilitasi	35,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	7	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	NA					12 Desa	0	12 Desa	10,000,000	12 Desa	10,000,000	12 Desa	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong
		7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disusun	NA					4 Dok	0	4 Dok	0	10 Dok	10,000,000	10 Dok	10,000,000	Kecamatan Pakong	Kecamatan Pakong



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAKONG

Alamat : Jl. Raya Pakong No. 75

KEPUTUSAN
CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/4/432.509/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

CAMAT PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pakong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Camat Pakong tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 12 Januari 2021



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19680103199503 1 003

Lampiran : Keputusan Camat PAKONG

Nomor : 188/4/432.509/2021

Tanggal : 12 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA																														
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																															
1.	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Kecamatan PAKONG	<table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 - 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 - 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 - 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 - 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 - 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 - 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 - 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 - 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 - 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 - 1,00	F	Gagal	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 - 2,00	D	Buruk	2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 - 3,00	C	Cukup	3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 - 4,00	B	Baik	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																																			
0 - 1,00	F	Gagal																																			
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk																																			
1,51 - 2,00	D	Buruk																																			
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																																			
2,51 - 3,00	C	Cukup																																			
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																																			
3,51 - 4,00	B	Baik																																			
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik																																			
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima																																			

2.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya 1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.	Kecamatan PAKONG	1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan; 2. A >80 – 90 Memuaskan; 3. BB >70 – 80 Sangat Baik; 4. B >60 – 70 Baik; 5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai); 6. C >30 - 50 Kurang; 7. D 0 - 30 Sangat Kurang.
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).	Kecamatan PAKONG	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN, dan KINERJA UNIT PELAYANAN sebagai berikut : 1. 25,00 – 64,99 D (Tidak baik); 2. 65,00 – 76,60 C (Kurang baik); 3. 76,61 – 88,30 B (Baik); 4. 88,31 – 100,00 A (Sangat baik).
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	Persentase		Jumlah Kegiatan Yang Dilayani ----- x 100% Jumlah Seluruh Kegiatan	Kecamatan PAKONG	

5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	Persentase		Jumlah Kegiatan Yang Dilayani ----- x 100% Jumlah Seluruh Kegiatan	Kecamatan PAKONG	
		Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina					

CAMAT PAKONG



Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19680103199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

Jabatan : Camat Pakong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 16 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Drs. EKA JUDYA SETIAWAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,80
2.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85 (A) 85% 100% 80% 85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang dilayani	85%
5.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Presentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan Presentase Desa/Kelurahan yang Telah dibina	85% 100%

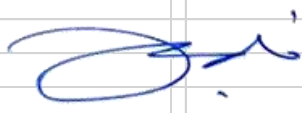
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,362,095,174.00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 4,500,000.00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 12,000,000.00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 50,000,000.00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp -	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Rp 11,770,000.00	APBD
Jumlah		Rp 1,440,365,174.00	

Pamekasan, 16 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Pamekasan

Pihak Pertama,
Camat Pakong


H. BADDRUT TAMAM, S.Psi


Drs. EKA JUDYA SETIAWAN